

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PENGUJIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN JUMLAH PENDUDUK  
TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN  
2013-2019**

**RINGKASAN SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Program**

**Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh:**

**Angga Ayu Shinta Juniartri**

**111830209**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## TUGAS AKHIR

### ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PENGUJIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN 2013-2019

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ANGGA AYU SHINTA JUNIARTRI**

**No Induk Mahasiswa: 111830209**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 25 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing

Ivana Octaria Sopacua, SE., M.Si., Ak.

Penguji

Nurofik, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 25 Januari 2022  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empirik pengaruh yang dimiliki oleh PAD, DAU, DAK dan Jumlah Penduduk terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dan sampel penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dari 5 kabupaten/kota pada provinsi DIY dengan periode 2013-2019 dan data kependudukan yang diperoleh dari BPS DIY. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DAK, dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Akan tetapi, secara parsial DAU tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Pada penelitian ini, terbukti bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada provinsi DIY pada periode 2013-2019.

**Kata kunci:** PAD, DAU, DAK, Jumlah Penduduk, Belanja Daerah, *Flypaper Effect*

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perhatian pemerintah mengenai pembangunan antar daerah meningkat mulai dari pengelolaan keuangan. Pemerintah harus dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hal tersebut, disebabkan karena transformasi sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi, yang disebut dengan era otonomi daerah. Hak, kekuasaan, dan kewajiban otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat setempat sama halnya dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam mengelola anggaran daerah, pemerintah daerah harus efektif agar tidak menghambat pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan. Anggaran yang dialokasikan untuk setiap daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD disebut dengan APBD.

Pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya membutuhkan anggaran. Anggaran merupakan alat penting yang digunakan untuk merencanakan segala kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu memanfaatkan sumber daya atau potensi yang dimiliki setiap daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan dari seluruh kegiatan yang dilakukan di setiap daerah disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Besar kecilnya PAD sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pengeluaran daerah, dan semakin besar PAD maka tanggung jawab pemerintah daerah juga semakin besar.

Ketidakseimbangan pembangunan dapat terjadi antar daerah. Karena disebabkan adanya keuangan daerah yang tidak relevan, hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan keuangan. Dana perimbangan dapat menutup ketidakseimbangan keuangan tersebut. Dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat otonom dalam rangka pelaksanaan tujuan pemerintah daerah dengan meningkatkan pelayanan dan pemulihan kesejahteraan masyarakat bersama disebut dengan dana perimbangan sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Dana dari APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah untuk mendanai kegiatan khusus daerah disebut dengan DAK. Pengalokasian DAK ditetapkan dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dalam APBN. Adanya DAK ini bertujuan untuk meminimalisir biaya dari kegiatan khusus yang ditanggung pemerintah daerah.

Sama halnya dengan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap belanja daerah. Jumlah penduduk yang tinggi merupakan aset penting bagi pemerintah daerah karena dapat meningkatkan keterampilan dan dapat membantu meningkatkan produksi nasional. Kualitas sumber daya manusia akan sangat memengaruhi struktur belanja daerah. Jika kualitas sumber daya manusia dan produktivitas rendah maka struktur belanja daerah juga akan ikut rendah.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, dalam menjalankan kebijakan tersebut setiap daerah mempunyai kesiapan yang berbeda. Ketimpangan kesiapan tersebut yang memicu adanya fenomena *flypaper effect*. Suatu fenomena dimana pemerintah daerah dalam menggunakan pembiayaan belanja daerah yang lebih banyak menggunakan dana transfer dibandingkan menggunakan PAD disebut *flypaper effect*.

Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena *Flypaper Effect* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis *Flypaper Effect* pada Pengujian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2013-2019.

## TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan memfokuskan pada hubungan kontraktual antara prinsipal dengan agen. Teori ini mengasumsikan jika agen dan prinsipal mempunyai kepentingan individu dalam melaksanakan kontrak kerja. Teori keagenan memperkirakan bahwa hubungan agen dengan prinsipal terdapat kesenjangan informasi, agen mempunyai banyak informasi dibanding dengan prinsipal.

Pada konteks anggaran daerah, pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai agen. Pemerintah pusat menyediakan serta memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, agen mempunyai lebih banyak informasi dibanding prinsipal sehingga, perlu adanya pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh badan legislatif (DPRD) terhadap kinerja agen

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yakni badan eksekutif untuk memastikan agen bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

## **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan yang diperoleh suatu daerah melalui pungutan yang sesuai dengan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan disebut dengan PAD (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

## **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan keseimbangan kemampuan keuangan setiap daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi disebut dengan DAU. DAU merupakan sumber terbesar dalam dana perimbangan.

## **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana yang sumbernya dari APBN kemudian didistribusikan kepada setiap daerah tujuannya untuk membantu mendanai keperluan khusus urusan daerah dan berdasar prioritas nasional pengertian tersebut sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 33, 2004) disebut dengan DAK. DAK akan didistribusikan untuk daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah. Oleh karena itu, adanya DAK merupakan bagian dari wujud tugas pemerintah daerah dalam bidang tertentu, yaitu untuk memajukan pelayanan publik.

## **Jumlah Penduduk**

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Beberapa orang yang tinggal atau mendiami suatu wilayah atau negara dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh wilayah maupun negara merupakan pengertian dari jumlah penduduk. Indonesia telah mengalami perubahan struktur sosial dan ekonomi, perubahan yang dialami oleh negara maju maka akan berpengaruh terhadap negara berkembang seperti perubahan teknologi industri. Dalam upaya membangun struktur sosial dan ekonomi, jumlah penduduk yang semakin bertambah menjadi sebuah kendala dalam proses pembangunan nasional.

## **Belanja Daerah**

Belanja daerah ialah seluruh kewajiban suatu daerah yang telah diakui dan dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran serta daerahnya tidak akan memperoleh kembali pembayarannya, pengertian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Belanja Daerah.

## **Flypaper Effect**

*Flypaper effect* ialah suatu kondisi pemerintah daerah dalam menggunakan pembiayaan belanja daerah lebih besar menggunakan dana transfer dibandingkan menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri, dana transfer tersebut adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, inilah yang menyebabkan pemborosan dalam belanja daerah (Oktavia, 2015).

## **Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah komponen penting dalam penyusunan APBD dan merupakan sumber pembiayaan untuk pemerintah daerah yang bersumber dari kekayaan serta kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing daerahnya guna mendanai kebutuhan belanja daerah. Penelitian milik Masdjojo & S Sukartono (2006) menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

& Suryono (2015) dan Kusumadewi & Rahman (2007) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

## **Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah**

DAU ialah dana yang sumbernya dari APBN yang kemudian diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat tujuannya untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan setiap daerah dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi.

Penelitian milik Bowo Laksono & Subowo (2014) dan Purpitasari & Kurnia (2015) mengungkapkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Akan tetapi, penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdini *et al.*, (2015) menyatakan bahwa DAU, DBH, dan PAD secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

## **Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah**

Dana alokasi khusus ialah dana yang berasal dari APBN yang didistribusikan kepada pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kegiatan atau keperluan khusus urusan daerah serta prioritas nasional. Penelitian milik Fadilah & Helmayunita (2020) dan Melda & Syofyan (2020) menjelaskan bahwa DAK secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Akan tetapi, milik Simanjuntak & Ginting (2019) menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tidak signifikan terhadap belanja daerah. Dari pernyataan yang sudah dijelaskan, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3: DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

## **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah**

Penduduk ialah subjek dari pembangunan nasional maupun daerah, salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana bagi dari segi kualitas dan kuantitas yang utilitasnya bisa dinikmati bagi masyarakat umum. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang sudah diteliti oleh Sanusi & Yusuf (2018) dan Gorahe *et al.*, (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Devita *et al.*, (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah yang tidak langsung. Dari pernyataan yang sudah dijelaskan, maka hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H4: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

## **Pengaruh DAU dan DAK secara simultan lebih memiliki pengaruh terhadap belanja daerah daripada pengaruh PAD secara parsial terhadap Belanja Daerah**

Perbandingan antara DAU dan DAK secara simultan dan PAD secara parsial terhadap Belanja Daerah tujuannya untuk melihat ada atau tidaknya fenomena *flypaper effect* di suatu pemerintah daerah. *Flypaper effect* terjadi apabila koefisien DAU dan DAK lebih tinggi daripada koefisien PAD pada hasil pengujian. Penelitian milik Prakosa (2004) dan Maimunah (2006) menyatakan bahwa koefisien DAU lebih tinggi daripada koefisien PAD terhadap belanja daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah. Serupa dengan penelitian milik Kusumadewi & Rahman (2007) menyatakan bahwa koefisien DAU terhadap

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

belanja daerah lebih tinggi daripada koefisien PAD terhadap belanja daerah maka terjadi *flypaper effect*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Iskandar (2012) menyatakan bahwa koefisien PAD lebih besar dari *unconditional grant* maka tidak terjadi *flypaper effect*, begitu juga penelitian milik Adiputra (2014) yang menunjukkan bahwa koefisien DAU lebih besar dari koefisien PAD, dapat dikatakan tidak terjadi fenomena *flypaper effect*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H5: Pengaruh DAU dan DAK secara simultan lebih memiliki pengaruh terhadap belanja daerah daripada pengaruh PAD secara parsial terhadap Belanja Daerah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menurut dimensi waktunya menggunakan jenis *time series* dari tahun 2013-2019 dan *cross section* di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang biasa disebut data panel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data yang didapatkan melalui media atau tidak secara langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi berganda yang menggunakan data kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi DIY pada tahun 2013-2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Pengujian analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk memaparkan suatu data. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian analisis statistik deskriptif:

**PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**



**[repository.stieykpn.ac.id](http://repository.stieykpn.ac.id)**

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 4. 1**  
**Analisis Statistik Deskriptif PAD**

	<b>N</b>	<b>Min.</b>	<b>Maks.</b>	<b>Mean</b>	<b>St. Dev</b>
KAB BANTUL	7	170.006.170.399	505.929.472.002	384.710.875.362,29	124.883.451.050.538
KAB SLEMAN	7	298.406.946.875	972.049.575.206	676.306.629.023,57	254.488.726.504.338
KAB GUNUNG KIDUL	7	66.710.859.953	271.370.043.389	187.512.509.295,71	79.143.303.541.135
KAB KULON PROGO	7	64.750.332.115	249.692.648.564	172.468.333.681,86	70.405.556.330.736
KOTA YOGYAKARTA	7	304.797.498.596	689.049.725.509	539.102.158.767,00	145.358.754.124.810
Valid (listwise)	N 7				

Pada tabel diatas merupakan hasil olah data variabel PAD yang menyatakan jika jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 7 tahun dan 5 kabupaten/kota di provinsi DIY. Nilai minimum untuk kabupaten Bantul yakni senilai Rp.170.006.170.399 pada tahun 2013, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar Rp.505.929.472.002 di tahun 2019. Lalu untuk nilai rata-rata periode waktu 7 tahun yakni sebesar Rp.384.710.875.362,29, nilai standar deviasi menunjukkan sebesar Rp.124.883.451.050.538. Pada kabupaten Sleman nilai minimum sebesar Rp.298.406.946.875 di tahun 2013, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar Rp.972.049.575.206 di tahun 2019. Untuk nilai rata-rata periode waktu 7 tahun yakni senilai Rp.676.306.629.023,57, nilai standar deviasi menunjukkan sebesar Rp.254.488.451.050.538. Di kabupaten Gunung Kidul nilai minimum sebesar Rp.66.710.859.953 ditunjukkan di tahun 2013, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar Rp.271.370.043.389 ada di tahun 2017. Nilai rata-rata pada periode waktu 7 tahun yakni sebesar Rp.187.512.509.295,71, dan untuk nilai standar deviasi yakni sebesar Rp.79.143.303.541.135. Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai minimum sebesar Rp.64.750.332.115 di tahun 2013, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar Rp.249.692.648.564 pada tahun 2017. Untuk nilai rata-rata periode waktu 7 tahun

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebesar Rp.172.468.333.681,86, dan untuk nilai standar deviasi sebesar Rp.70.405.556.330.736. Kota Yogyakarta memiliki nilai minimum sebesar Rp.304.797.498.596 di tahun 2013, akan tetapi nilai maksimum sebesar Rp.689.049.725.509 pada tahun 2019. Nilai rata-rata kota Yogyakarta pada periode waktu 7 tahun yakni sebesar Rp.539.102.158.767,00, dan untuk nilai standar deviasi yakni sebesar Rp.145.358.754.124.810.

**Tabel 4. 2**  
**Analisis Statistik Deskriptif DAU**

	<b>N</b>	<b>Min.</b>	<b>Maks.</b>	<b>Mean</b>	<b>St. Dev</b>
KAB BANTUL	7	854.810.654.000	1.015.302.849.000	960.933.223.857,14	53.388.669.942.217
KAB SLEMAN	7	891.589.912.000	1.035.862.077.000	981.608.663.000,00	47.324.669.451.468
KAB GUNUNG KIDUL	7	779.069.238.000	965.080.463.000	899.363.513.857,14	68.706.943.327.092
KAB KULON PROGO	7	59.497.879.000	732.088.720.000	602.640.669.571,43	241.808.972.716.738
KOTA YOGYAKARTA	7	597.212.209.000	700.372.564.000	646.568.525.428,57	35.445.048.190.856
Valid (listwise)	N 7				

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 4. 3**  
**Analisis Statistik Deskriptif DAK**

	<b>N</b>	<b>Min.</b>	<b>Maks.</b>	<b>Mean</b>	<b>St. Dev</b>
KAB BANTUL	7	6.091.437.000	342.620.916.112	191.758.711.608,14	143181102992.420
KAB SLEMAN	7	29.421.080.000	321.540.108.398	181.621.512.335,86	132167303243.590
KAB GUNUNG KIDUL	7	61.562.860.000	342.547.190.571	199.419.169.566,29	123539974897.146
KAB KULON PROGO	7	47.077.300.000	293.857.452.570	159779579.344,86	105231717007.926
KOTA YOGYAKARTA	7	2.249.900.000	170.562.681.136	91643053212,29	82729710086.569
Valid N (listwise)	7				

**Tabel 4. 4**  
**Analisis Statistik Deskriptif JP**

	<b>N</b>	<b>Min.</b>	<b>Maks.</b>	<b>Mean</b>	<b>St. Dev</b>
KAB BANTUL	7	947.072	1.018.402	983.130,43	25.634.720
KAB SLEMAN	7	1.141.733	1.219.640	1.180.580,00	28.097.164
KAB GUNUNG KIDUL	7	700.191	742.731	722.007,29	15.322.807
KAB KULON PROGO	7	403.179	430.220	416.720,29	9.745.706
KOTA YOGYAKARTA	7	402.679	431.393	417.488,14	10.486.176
Valid N (listwise)	7				

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 4. 5**  
**Analisis Statistik Deskriptif BD**

	N	Min.	Maks.	Mean	St. Dev
KAB BANTUL	7	1.355.174.639.963	2.283.585.037.902	1.937.903.883.240,14	310.339.313.331.876
KAB SLEMAN	7	1.733.223.825.924	2.776.995.369.323	2.334.683.291.426,14	361.243.014.877.333
KAB GUNUNG KIDUL	7	1.236.639.665.427	2.132.222.291.589	1.654.902.894.361,71	305.310.781.092.087
KAB KULON PROGO	7	935.369.836.235	1.671.661.810.766	1.316.230.275.167,57	257.665.864.152.772
KOTA YOGYAKARTA	7	1.134.964.779.286	1.734.593.335.861	1.519.202.901.310,14	201.769.773.457.575
Valid N (listwise)	7				

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengukur model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan melihat nilai *asymp.sig* dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai *asymp.sig* dari hasil pengujian lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini memiliki distribusi normal.

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Unstd. Residual	Keterangan
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	0,971	Data berdistribusi normal



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Hasil Uji Multikolinearitas

Uji yang mempunyai tujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi biasa disebut dengan uji multikolinearitas. Kriteria menentukan tidak terjadinya multikolinearitas terhadap suatu data yakni jika nilai *tolerance* > 0,1 serta nilai VIF < 10.

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0,787	1,271	Tidak terjadi multikolinearitas
DAU	0,630	1,587	Tidak terjadi multikolinearitas
DAK	0,916	1,092	Tidak terjadi multikolinearitas
JP	0,676	1,469	Tidak terjadi multikolinearitas

## Hasil Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi ialah uji yang mempunyai tujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi pada model regresi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1. Pengambilan keputusan atas terjadi atau tidaknya autokorelasi pada data penelitian yang menggunakan uji Durbin Watson.

**Tabel 4. 8**

Model	Durbin Watson
1	1,593

**Hasil Uji Durbin Watson**

**PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**



**[repository.stieykpn.ac.id](http://repository.stieykpn.ac.id)**

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Hasil Uji Autokorelasi Run Test

Pengambilan keputusan terhadap uji autokorelasi menggunakan uji *run test* adalah jika nilai *asympt. Sig.* < 0,05 maka dapat dipastikan terdapat autokorelasi pada data penelitian.

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Autokorelasi Run Test**

	<i>Unstd. Residual</i>	Keterangan
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,039	Terdapat Autokorelasi

## Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan tujuannya untuk mengetahui terjadi atau tidaknya *variance* residual dari suatu penelitian terhadap penelitian lain ada dalam model regresi. Pengambilan keputusan jika nilai signifikansi yang diperoleh setelah dilakukannya pengujian lebih besar dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas.

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
Ln_PAD	0,769	Tidak terjadi heterokedastisitas
Ln_DAU	0,625	Tidak terjadi heterokedastisitas
Ln_DAK	0,164	Tidak terjadi heterokedastisitas
Ln_JP	0,328	Tidak terjadi heterokedastisitas

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENGUJIAN HIPOTESIS

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ialah suatu metode analisa yang tujuannya untuk mengetahui ketergantungan yang dimiliki oleh variabel independen terhadap variabel dependen dengan jumlah satu atau lebih dari satu.

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig.
Constant	16,702	21,652	0,000
Ln_PAD	0,194	9,389	0,000
Ln_DAU	0,060	1,732	0,094
Ln_DAK	0,040	4,071	0,000
Ln_JP	0,273	7,437	0,000

Berikut ini persamaan regresi yang diperoleh setelah dilakukannya pengujian:

$$BD = 16,702 + 0,194 PAD + 0,060 DAU + 0,040 DAK + 0,237 JP + e$$

Persamaan regresi di atas diperoleh setelah dilakukannya pengujian data penelitian, sehingga persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta 16,702. Jika variabel PAD, DAU, DAK dan JP dianggap konstan, maka dapat terjadi perubahan pada belanja daerah, yakni kenaikan nilai belanja daerah sebesar 16,702. Kemudian nilai koefisien untuk variabel PAD yakni sebesar 0,194 jika PAD meningkat sebesar 1% dan variabel lainnya tetap atau tidak terjadi perubahan, maka nilai belanja daerah juga ikut meningkat sebesar 0,194 atau 19,4%. Lalu untuk nilai koefisien dari variabel DAU yakni sebesar 0,060, jika variabel DAU meningkat sebesar 1% dan menganggap variabel yang lain tetap, maka belanja daerah juga akan mengalami

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peningkat sebesar 0,060 atau 60%. Pada variabel DAK nilai koefisien sebesar 0,040 jika variabel DAK bertambah 1% dan menganggap variabel lainnya tetap, maka belanja daerah juga akan ikut meningkat sebesar 0,040 atau 40%. Pada hasil persamaan regresi, nilai koefisien untuk variabel JP sebesar 0,237 jika JP meningkat sebesar 1% akan tetapi, variabel lainnya tidak ada perubahan maka belanja daerah akan ikut meningkat sebesar 0,237 atau 23,7%, dengan nilai belanja daerah sebesar 16,702.

## Uji Statistik t

Uji statistik T digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara tersendiri. Dari hasil pengujian dan pengolahan data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel PAD, DAK, Jumlah Penduduk secara independen berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk variabel DAU yakni berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah.

## Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan tujuannya untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Dilihat pada tabel 4.13 menunjukkan hasil pengujian dari uji F bahwa secara umum variabel PAD, DAU, DAK, dan juga Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

## Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan tujuannya untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen yang ditunjukkan dari nilai *Adjusted R Square*.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4. 12  
Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,924	0,914

## Perbandingan Uji F (DAU dan DAK) dengan Uji t (PAD) terhadap Belanja Daerah

Tabel 4. 13  
Hasil Pengujian Uji F dan Uji t

Variabel	Uji F	<i>Adjusted R Square</i>
DAU	16,180	0,472
DAK		
PAD		0,590

Berdasarkan tabel di atas hasil uji F dengan nilai F hitung untuk pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap belanja daerah yakni sebesar 16,180 dan untuk nilai F tabel yakni sebesar 3,28. Hal ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Terkait dengan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap belanja daerah sebesar 0,472. Bermakna bahwa DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah sebesar 47,2%. Merujuk pada tabel 4.15 nilai *Adjusted R Square* pengaruh PAD secara parsial terhadap belanja daerah sebesar 0,590. Bermakna bahwa PAD berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah sebesar 59%.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berkaitan dengan hasil perbandingan pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap belanja daerah lebih kecil daripada pengaruh PAD secara parsial terhadap belanja daerah.

## **Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah**

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Melihat tabel 4.12 mengenai hasil uji t, diperoleh bahwa nilai t hitung sebesar 9,389 dan untuk nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, nilai ini menyatakan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada  $\alpha = 5\%$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama didukung. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Rahmawati & Fajar (2017), Kusumadewi & Rahman (2007) dan Purpitasari & Kurnia (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa PAD secara signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing daerahnya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, yang ditunjukkan apabila PAD meningkat maka belanja daerah juga akan ikut naik.

## **Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah**

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dilihat dari tabel 4.12 yang menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel DAU sebesar 1,732 dan untuk nilai signifikansi 0,094 lebih besar dari 0,05 artinya DAU tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah pada  $\alpha = 5\%$ . Dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua tidak didukung. Hal tersebut sesuai dengan penelitian milik Nailufar & Sufitrayati (2019) dan Nabilah *et al.*,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(2016) bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil dari pengujian tersebut berbeda dengan penelitian milik Prakosa (2004) yang menyebutkan bahwa penurunan pengeluaran belanja daerah disebabkan karena berkurangnya dana transfer. Hal ini, DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang didistribusikan untuk mendanai belanja pegawai yang berupa gaji dan tunjangan, belanja bantuan desa serta belanja hibah. Penelitian milik Sriwahyuni (2010) menemukan bukti empiris bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Setiap tahunnya Indonesia terjadi kenaikan belanja daerah terutama pada belanja rutin yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk menambah jumlah PNS serta menaikkan gaji PNS. Sehingga, DAU yang digunakan untuk belanja daerah proporsinya hanya sedikit.

## **Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah**

Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dilihat dari tabel 4.12 yang menunjukkan bahwa nilai t hitung yakni sebesar 4,071 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian hipotesis ketiga didukung. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia *et al.*, (2015), Bowo Laksono & Subowo (2014) dan Hasan *et al.*, (2015) mengungkapkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

DAK dan DAU merupakan dana transfer. Tetapi ada perbedaan antara DAK dan DAU yaitu DAK hanya digunakan untuk belanja yang dapat mensejahterakan rakyatnya melalui belanja dalam hal pelayanan publik dan belanja dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga, dapat menarik investor untuk menanam modal di daerah tersebut. DAK lebih



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengutamakan belanja langsung, maka wajar saja apabila DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah.

## **Pengaruh JP terhadap Belanja Daerah**

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa JP berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Mengacu pada tabel 4.12 yang mengungkapkan bahwa nilai t hitung sebesar 7,437 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel JP berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada  $\alpha = 5\%$ . Sehingga, dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat didukung. Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya milik Sasana (2011) serta Sanusi dan Yusuf (2018) yang hasil pengujiannya mengungkapkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Penduduk merupakan salah satu subyek pembangunan, ada peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan meningkatnya sarana serta prasarana umum, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Adanya peningkatan jumlah penduduk maka akan membutuhkan anggaran yang lebih tinggi agar pertumbuhan ekonomi memiliki kualitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah penduduk perlu dikendalikan.

## **Pengaruh DAU dan DAK secara simultan lebih memiliki pengaruh terhadap belanja daerah daripada pengaruh PAD secara parsial terhadap Belanja Daerah**

Hasil pengujian dari uji F untuk pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap belanja daerah dan untuk uji koefisien determinasi untuk pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap belanja daerah serta untuk pengaruh PAD secara parsial terhadap belanja daerah membuktikan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect*. Pada hasil tersebut nilai dari

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Adjusted R Square* untuk pengaruh PAD secara parsial terhadap belanja daerah lebih besar daripada nilai *Adjusted R Square* untuk pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap belanja daerah. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Iskandar (2012), Nabilah *et al.*, (2016) dan (Adiputra, 2014) menyatakan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada kota yang dijadikan objek penelitian. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang sudah dinyatakan sebelumnya, yakni nilai pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap belanja daerah lebih berpengaruh daripada pengaruh PAD secara parsial terhadap belanja daerah, dari hipotesis tersebut dinyatakan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect*.

Teori keagenan dapat dikaitkan dengan adanya fenomena *flypaper effect* pada DAU, DAK dan PAD terhadap belanja daerah. Adanya permasalahan kepentingan dapat menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Permasalahan kepentingan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perbedaan kepentingan tersebut yakni adanya keinginan pemerintah pusat dalam menggunakan DAU dan DAK dilakukan secara efektif guna mendanai belanja daerahnya serta diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD sesuai dengan kebijakan desentralisasi.

## KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil pengujian serta pengolahan data yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Pada variabel PAD setelah dilakukannya penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian tersebut secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pada variabel DAU yang menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah
3. Pada variabel DAK serupa dengan variabel PAD yang menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah.
4. Pada variabel jumlah penduduk menunjukkan hubungan positif terhadap belanja daerah, kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil pengujian serta pengolahan data yang telah dilakukan
5. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa pengaruh PAD secara parsial lebih besar dibandingkan dengan pengaruh DAU dan DAK secara simultan hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota provinsi DIY dengan periode waktu 2013-2019.

## KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya.

Keterbatasan tersebut meliputi:

1. Penelitian ini menggunakan data yang berhubungan dengan penerimaan daerah kabupaten/kota di provinsi DIY hanya sebatas PAD, DAU dan DAK tidak menyertakan komponen penerimaan daerah secara keseluruhan.
2. Terdapat autokorelasi pada data yang digunakan untuk penelitian. Adanya autokorelasi disebabkan penggunaan data panel pada data penelitian ini.
3. Hanya mencakup provinsi DIY sehingga tidak dapat digeneralisasi.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SARAN

Berkaitan dengan kesimpulan serta keterbatasan yang sudah disampaikan oleh peneliti, maka saran yang diberikan peneliti untuk pemerintah daerah dan peneliti berikutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian yang bersumber dari dana perimbangan agar dapat mengetahui dampak dari dana perimbangan yang telah didistribusikan kepada pemerintah daerah.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode waktu serta dapat menambah populasi yang digunakan untuk penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70.
- Kusumadewi, D., & Rahman, A. (2007). *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Journal.Uii.Ac.Id*, 11(1).
- Rahmawati, L. A., & Suryono, B. (2015). *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(9).
- Simanjuntak, A., & Ginting, C. M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *JURNAL MANAJEMEN*, 5(2), 183–194.